BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

PERSIAPAN *EXERCISE TRIDENT RESOLVE* OLEH KEMHAN RI

Aryojati Ardipandanto
Analis Legislatif Ahli Madya
aryojati.ardipandanto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 27 Januari 2026, Direktur Kesehatan (Dirkes) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Marsekal Utama (Marsma) TNI Mukti Arja Berlian, membuka pertemuan *middle planning conference* (MPC) untuk kegiatan ASEAN *Defence Ministers' Meeting-Plus* (ADMM-Plus) *Experts' Working Group* (EWG) *Combined Field Training Exercise* (*Exercise Trident Resolve*/ETR) di Banten. Pertemuan ini merupakan langkah krusial dalam mematangkan koordinasi latihan gabungan antarnegara anggota ADMM-Plus. Latihan ini mengintegrasikan tiga kelompok kerja ahli, yaitu kedokteran militer (*military medicine*), bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (*humanitarian assistance and disaster management*/HADR), serta keamanan siber (*cyber security*), yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2026 di Banten.

Marsma TNI Mukti Arja Berlian menekankan bahwa ETR dirancang dengan skenario bencana kompleks berskala besar, mulai dari gempa bumi, erupsi Gunung Krakatau, hingga tsunami. Kondisi ini menuntut kesiapan bantuan internasional dan interoperabilitas yang tinggi antara Angkatan Bersenjata ASEAN dengan delapan negara mitra wicara, yang meliputi Amerika Serikat, Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, New Zealand, dan Rusia. Momen ini merupakan tonggak penting bagi kerja sama pertahanan ADMM-Plus karena menyatukan berbagai keahlian dalam satu kerangka kerja yang realistis untuk membangun kepercayaan (*confidence building measures*) dan kapasitas teknis di lapangan.

Selain simulasi koordinasi, Kelompok Kerja Ahli Kedokteran Militer (*EWG on Military Medicine*), yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Amerika Serikat, juga akan melaksanakan kegiatan bakti kesehatan, *project-based community medical development*, serta *medical aid provision* yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Provinsi Banten. Integrasi antara pemerintah daerah, TNI, dan mitra internasional dalam latihan ini diharapkan menjadi model penanggulangan bencana di masa depan. Agenda MPC yang berlangsung pada 26–30 Januari 2026 ini mencakup berbagai rangkaian teknis, mulai dari *combined EWG briefing*, konferensi persiapan, lokakarya protokol komunikasi, hingga peninjauan lokasi (*site survey*) untuk memastikan seluruh aspek operasional siap dilaksanakan.

Memasuki hari kedua MPC untuk ETR pada 28 Januari 2026, Kemhan RI bersama delegasi negara-negara ADMM-Plus bergerak cepat dari tahap konseptual menuju perencanaan teknis di lapangan. Fokus utama agendanya adalah peninjauan lokasi dan pembahasan komitmen aset medis untuk menghadapi skenario bencana. Kepala Sub Direktorat Dukungan Kesehatan Ditjen Kuathan Kemhan RI, Kolonel Laut dr. Suswardana, memimpin jalannya kegiatan mewakili Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan RI selaku Ketua Bersama (*Co-Chair*) Indonesia, didampingi oleh mitra dari Amerika Serikat, Lieutenant Colonel Philip Durando. Dalam sesi ini, delegasi dari 18 negara meninjau langsung medan di Banten yang akan menjadi pusat simulasi operasi gabungan pada September 2026. Survei lapangan ini krusial untuk memastikan kesiapan infrastruktur bagi integrasi tiga area latihan: kedokteran militer, HADR, serta keamanan siber.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI perlu memberikan atensi strategis terhadap pelaksanaan ETR sebagai bagian diplomasi pertahanan Indonesia serta upaya penguatan interoperabilitas TNI dalam kerangka kerja sama ADMM-Plus. Komisi I DPR RI dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan komprehensif dari Kemhan RI dan TNI terkait tujuan strategis latihan, kesiapan anggaran, mekanisme pengendalian, serta dampaknya terhadap kapasitas pertahanan nonmiliter, khususnya dalam penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Komisi I DPR RI perlu memastikan bahwa keterlibatan negara mitra, yang termasuk pada aspek keamanan siber, pertukaran data, dan dukungan medis, tetap berada dalam koridor kepentingan nasional, prinsip kehati-hatian, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara. Komisi I DPR RI dapat mendorong agar hasil latihan dan *best practices* HADR serta kedokteran militer ditransformasikan menjadi rekomendasi kebijakan nasional dan penguatan kerja sama sipil-militer. Selain itu, Komisi I DPR RI perlu memastikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui bakti kesehatan serta memastikan sinergi pemerintah daerah berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Sumber

indonesiadefense.com, 28 Januari 2026;
kemhan.go.id, 27 Januari 2026; dan
nasional.tvrinews.com, 29 Januari 2026.

IsuSepekan

Koordinator Anih Sri Suryani
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Ahmad Budiman
Novianti
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang
Sony Hendra P.
Rafika Sari
Rasbin
Venti Eka Satya
Hilma Meilani
Niken Paramita P.

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Nur Sholikah P. S.

LAYOUTER

Devindra R. Oktaviano
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Rahmat Sawalman
Fitria Melinda
Muhammad Zakik A.
Fadila Puti Lenggo G.
Yiyis Aldi Mebra
Anugrah Juwita S.

Timothy Joseph S. G.
Eva Mutia Ghofarany
Farhan Ryandi

https://pusaka.dpr.go.id
@pusaka_bkdprri
©PusakaBK2026
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making